

## Faktor-Faktor yang Mendorong *Human-Trafficking*: Kajian di Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Burhanudin Sanusi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> IAIN Syekh Nurjati; burhanudin.sanusi@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

*Human Trafficking;*

*Indramayu;*

*Tenaga Kerja Indonesia*

### ABSTRACT

Kasus perdagangan manusia di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari latar belakang itu, pertanyaannya kemudian adalah mengapa kenyataan tersebut tidak menyurutkan niat para calon urban labor. Penelitian ini mau mengungkap faktor-faktor apa saja yang mendorong menguatnya fenomena urban labor tersebut. Penelitian ini menggunakan logika alur pikir fenomenologis-antropologis dengan mengaitkannya pada usaha mengungkap alasan maupun latar belakang seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam bersikap maupun bertindak. Sementara, untuk mendapatkan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah indepth interview (wawancara mendalam) dengan pertanyaan terstruktur. Temuan sementara penelitian ini adalah; pertama, ada semacam perubahan orientasi menjadi urban labor dari orientasi pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar menjadi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kedua, faktor budaya patriarki, dalam konteks budaya Indonesia, nampak masih cukup kuat di mana menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang tidak setara. Ketiga, rendahnya pendidikan merupakan faktor lain yang tidak kalah penting yang sering terlibat secara langsung terjadinya perdagangan manusia.

---

## PENDAHULUAN

Satu dari sekian banyak kejahatan kemanusiaan modern yang sering terjadi, khususnya di negara-negara ketiga/berkembang, adalah perdagangan manusia, atau yang biasa disebut dengan istilah *human trafficking*. Di negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Laos, misalnya, *human trafficking* menjadi isu yang cukup serius. Hal tersebut karena dari tahun ke tahun, angka kasus tersebut cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam Laporan Tahunan (*annual report*), *International Organization for Migration* (IOM)-Jakarta, misalnya, menunjukkan bahwa antara tahun 2005 sampai tahun 2017, di Indonesia saja telah terjadi 8.876 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memperlihatkan angka yang hampir tidak berbeda. Dari tahun 2011 sampai tahun 2018 telah terjadi 33.000 kasus. Demikian pula dalam catatan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

melaporkan bahwa antara tahun 2011 sampai tahun 2017 telah terjadi 422 kasus. Angka tersebut terhitung yang paling tinggi dalam sejarah perdagangan manusia. Dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Provinsi Jawa Barat termasuk yang cukup tinggi angka kasus perdagangan manusia. Dalam laporan Polda Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2017 saja telah terjadi 18 kasus. Ada kenaikan angka sampai 52%. Sementara, di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang angka kasus *human trafficking*-nya cukup besar, di bawah Kabupaten Cianjur. Polres Indramayu mencatat pada tahun 2018 telah terjadi 83 kasus. Dari fakta tersebut penelitian ini diproyeksikan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong naiknya angka *urban labor* dan yang menyokong terjadinya perdagangan manusia. *Locus* penelitian ini adalah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi-antropologis. Suatu pendekatan yang mengaitkannya dengan usaha mengungkap alasan maupun latar belakang seseorang, kelompok, atau organisasi dalam bersikap maupun bertindak—dalam konsepsi Alfred Schutz hal tersebut diistilahkan dengan *because of motive* atau oleh sosiolog klasik, Max Weber diistilahkan dengan *in order to motive*. Sebagai bagian terpenting dalam cara pikir fenomenologi tersebut adalah metode etnometodologi. Sehingga, dalam penelitian ini etnometodologi digunakan dan difungsikan secara optimal untuk mengungkap sekaligus mengeksplorasi *common sense* individu, organisasi, maupun kelompok (Muhadjir, 1991:65). Tentu dalam eksplorasi tersebut *stressing*-nya adalah perilaku, tindakan, atau bahkan pemikiran sekalipun individu, kelompok, maupun organisasi; Bagaimana individu menjalin dan memberi makna pada interaksi sosial—termasuk juga memaknai dan memahami perubahan sosial—dimana individu menjadi *member* dari kelompok maupun organisasi tertentu?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Human Trafficking dalam Konteks**

#### 1. Pengertian dan Batasan

*Human Trafficking* atau yang dikenal juga dengan perdagangan manusia sering kali masih menjadi perdebatan terkait, katakan saja seputar pengertian, batasan, dan bentuknya. Artinya, peminat isu perdagangan manusia masih belum menemukan kata sepakat terhadap isu tersebut walaupun yang terkait dengan pengertian, batasan, dan bentuknya. Perbedaan persepsi seputar pengertian, batasan, dan bentuknya berlangsung cukup lama. Namun, setelah lahirnya Protokol 2000 perbedaan tersebut mulai berkurang.

Berdasarkan pengertian yang tertulis dalam lembaran Protokol 2000 tersebut, perdagangan manusia sedikitnya mencakup beberapa aktivitas berikut; *pertama*, adanya penjangkaran (*recruitment*). Dalam Protokol tersebut, kata *recruitment* mempunyai makna yang tidak tunggal. Artinya, kata tersebut berarti perekrutan dengan disertai iming-iming atau janji-janji untuk bermigrasi atau berpindah dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuan. Makna lain istilah tersebut adalah perpindahan seseorang dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuan karena pengaruh orang lain walaupun tanpa perjanjian sebelumnya. Dari dua perbedaan makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisa dikatakan sebagai bentuk perdagangan manusia ketika di dalamnya ada proses *recruitment* dengan berbagai bentuk, cara, dan motifnya.

*Kedua*, ada aktifitas pengiriman ke daerah/negara lain dan bersifat tertutup dan di mana ada perasaan asing di dalamnya. Dikatakan sebagai korban perdagangan manusia juga ketika korban mengalami semacam isolasi diri baik secara fisik maupun psikis di mana bahasa dan budaya daerah/negara tujuan berbeda dengan asal daerah/Negara-nya. Di samping itu, kondisi lain yang menguatkan sebagai korban perdagangan manusia ketika ada aktifitas yang bersifat eksploitatif setelah proses pengiriman tersebut. Ini artinya, masuknya dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain tersebut tidak dilihat dari aspek legalitasnya, namun pada sisi aktifitas yang didapatkan setelah proses pengiriman tersebut (Tagaroa dan Sofia, 1999:41-54).

*Ketiga*, adanya aktifitas *perpindahan*, *penampungan*, maupun *penerimaan* di mana ketiga proses tersebut merupakan satu paket. Artinya, hampir mustahil kegiatan atau aktifitas *human trafficking* hanya melalui salah satu dari ketiga proses tersebut. Proses pertama, korban mengalami perpindahan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuannya. Sudah barang tentu, perpindahan di sini baik didasari atas kesadaran korban sendiri ataupun tidak. Tidak sedikit kasus, misalnya, beberapa korban *trafficking* yang mengalami semacam aktifitas yang tak *terjadualkan*. Waktu pemberangkatan, misalnya lagi, tidak jarang mendadak tidak terkonfirmasi dengan korban jauh-jauh hari. Sehingga, si korban tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Tidak tau persis apakah kondisi ini memang disengaja atau tidak. Bisa jadi, kondisi ini menunjukkan tidak adanya komunikasi yang intens antaragen.

Proses selanjutnya adalah *penampungan*. Proses ini biasanya dilakukan sekali sampai tiga kali. Jumlah tersebut bersifat tidak pasti, bergantung pada kondisi dan kesiapan semua komponen yang terkait: korban, agen pengirim, maupun agen penerima. Proses ini juga, biasanya, berada di daerah/negara asal dan di daerah/negara tujuan. Seperti yang dituturkan oleh Khomsatun, mantan korban *trafficking* bahwa,

“...saya waktu itu mengalami transit samapai ke tiga tempat penampungan. Ketiganya di Indonesia: dua di Jawa dan satu di Pontianak. Dari ketiga tempat transit (penampungan) tersebut hanya yang penampungan pertama saja yang lama. Hampir dua bulan. Di sini [tempat penampungan pertama] saya sedikit banyak dikenalkan budaya daerah/negara tujuan yang waktu itu adalah Malaysia.<sup>1</sup>”

Proses selanjutnya, *keempat*, adalah adanya tindakan eksploitatif terhadap korban. Eksploitatif di sini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berorientasi mengambil keuntungan, tujuan, dan kepentingan pribadi dari orang lain. Tindakan eksploitasi terjadi ketika seseorang mendominasi orang lain dalam konteks tertentu. Eksploitasi di sini tentu bentuknya tentu tidak tunggal. Sarbini, buruh migran Indonesia di Saudi Arabia mengalami eksploitasi fisik yang luar biasa dalam bentuk kerja paksa. Sarbini menuturkan:

“...Saya bekerja di Saudi Arabia, dalam kontraknya disepakati tiga tahun. Sekitar sepuluh bulan, saya lari dari rumah majikan saya. Saya lari keluar dari rumah majikan tengah malam tanpa sepengetahuan mereka. Saya sudah ngomong beberapa kali mau keluar, tapi tidak diperkenankan. Saya capek sekali kerja dengan keluarga majikan saya itu. Kerja tidak ada istirahatnya, hampir 24 jam.<sup>2</sup>”

Dari beberapa kasus, nampaknya, eksploitasi merupakan bentuk yang sering sekali dialami oleh korban *human trafficking* dalam beragam bentuk. Hasil dari interview beberapa korban *trafficking* di Kabupaten Indramayu, peneliti dapat simpulkan beberapa bentuk dari tindakan eksploitasi yang dilakukan majikan. Pertama, eksploitasi secara fisik. Siapapun bisa dikatakan mengalami eksploitasi fisik ketika terikat dengan kekuatan tertentu. Eksploitasi juga terjadi ketika ada pemaksaan yang itu bertentangan dengan dirinya dengan cara diiming-imingi tertentu. Kedua, eksploitasi secara psikis. Bentuk kedua eksploitasi ini, biasanya, bersifat lebih *soft*, namun pengaruhnya terhadap kejiwaan seseorang sangat besar. Tidak sedikit jumlahnya korban *trafficking* mengalami gangguan jiwa karena mengalami eksploitasi dari majikan.

Tidak sedikit juga korban *trafficking* di samping mendapatkan kekerasan fisik, banyak dari mereka juga tidak mendapatkan upah selama bekerja. Padahal, tujuan awal mereka adalah bekerja untuk mendapatkan uang. Materi pada dasarnya adalah unsur utama yang mendorong korban untuk bekerja di luar daerah/negara. Tujuan utama tersebut sering kali dibungkus ke dalam bahasa lokal mereka yang sangat halus. Sehingga ungkapan, salah satunya, misalnya, *pengen urip pada bari sedulur lan batur* (pengen hidup sama seperti saudara dan temen) menjadi kian

---

<sup>1</sup>Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2019, pkl. 17.20 di rumahnya.

<sup>2</sup>Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019, pkl. 08.30 di ladangnya.

populer di tingkat remaja usia sekolah. Seakan-akan mereka sudah dibebani dan diwajibkan untuk berfikir masa depan ekonomi keluarganya.

## 2. Bentuk-Bentuk Human Trafficking

Seperti yang dideskripsikan di atas tadi bahwa *human trafficking*, pada praktiknya, yang sering kali terjadi di lapangan, khususnya yang di Kabupaten Indramayu, mengambil paling sedikitnya empat aktifitas. *Pertama*, eksploitasi seks. Dalam beberapa kasus perdagangan manusia, lagi-lagi khusus di Kabupaten Indramayu, bentuk ini (eksploitasi seks) adalah yang paling dominan dan menempati angka pertama. Tentu saja eksploitasi seks di sini mengambil bentuknya yang tidak tunggal, tapi beragam. Ada diantara mereka memang dengan sengaja dipekerjakan di tempat-tempat pelacuran. Ada juga menjadi korban eksploitasi seks majikan atau orang lain yang terlibat dalam mempekerjakan si korban, orang-orang agen misalnya (Tagaroa dan Sofia, 1999:114-120).

Sutini, salah satu korban perdagangan manusia asal Kabupaten Indramayu, yang mempunyai pengalaman dilacurkan menceritakan:

“...setamat SMA, beberapa kali saya melamar pekerjaan baik di dalam kota maupun di luar Kota Indramayu. Selama itu pula lamaran itu pula tidak menuai jawaban. Ada satu dua jawaban, tapi di perusahaan ritel. Saya tdk begitu suka dengan pekerjaan itu. Hanya beberapa bulan kerja setelah itu saya keluar. Ketika dalam keadaan nganggur, ada tawaran kerja di pabrik konveksi di Malaysia dengan gaji, kalau dirupiahkan, sekitar Rp. 5.000.000,-. Waktu i tu, gaji sekitar Rp. 5.000.000,- sangat besar sekali. Tanpa pikir panjang lagi, saya mendaftar. Sekitar satu bulan lebih saya menunggu, tidak lama kemudian saya berangkat. Sesampai di Malaysia saya tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan, tapi justeru dilacurkan.<sup>3</sup> “

Sementara, sebagian lagi, dijadikan pemuas seks majikan, anak laki-lakinya, atau bahkan pembantu laki-lakinya juga. Dari banyak kasus, bentuk eksploitasi seks ini lumrah terjadi di negara-negara Arab dimana masyarakatnya sangat tertutup. Tidak jarang dari korban perdagangan manusia ini secara umum, tidak saja dari Kabupaten Indramayu saja, selesai kontrak kerja dan pulang ke negara asalnya dengan menggandeng anak balita. Sebaliknya, dari beberapa cerita di kalangan mereka, tidak sedikit dari mereka yang mempunyai anak dari hubungan gelap tersebut yang ketika masa kontrkannya habis dan mau kembali ke negara asalnya anak-anak mereka titipkan ke teman mereka. Bahkan, parahnya lagi, ada dari mereka yang maninggalkan anak mereka di tempat-tempat umum begitu saja.

---

<sup>3</sup>Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2019, pkl. 14.20 di rumahnya.

Fenomena kasus bawa anak setelah pulang kerja dari Arab, dalam bahasa lokal disebutnya dengan istilah *gawa olih-olih Arab*. Nampaknya, di sebagian kalangan masyarakat di Kabupaten Indramayu, fenomena sosial tersebut sudah tidak lagi dianggap dan dinilai tabu. Hal itu kemungkinannya karena *gawa olih-olih Arab* sudah menjadi bagian dari *trand* atau risiko kerja di Arab. Sehingga, tidak mengherankan banyak dari calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ketika siap mau berangkat salah satu bawaan wajib mereka adalah alat kontrasepsi hormonal. Kebanyakan mereka, biasanya yang banyak dibawa adalah berupa pil Keluarga Berencana (KB). Tidak sedikit pula, sebelum mereka berangkat mereka sudah pasang alat kontrasepsi sejenis *intrauterine device* (IUD).

Selain eksploitasi seks, bentuk lain perdagangan manusia berikutnya yang sering dialami oleh pekerja urban (*urban labor*) di Kabupaten Indramayu, *kedua*, adalah *Asisten Rumah Tangga* (ART) (Sudjana, 2009:15-19). Ada banyak kasus *human trafficking* pada bentuk ini. Salah satu yang sering sekali terjadi dan dialami oleh ART asal dari Kabupaten Inramayu ini adalah adanya penyiksaan fisik. Bentuk *trafficking* ini memang sangat lumrah terjadi diman-mana baik ART yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari sekian banyak negara yang merupakan tujuan kerja ART, bisa dikatakan, di banding negara-negara Asia, di negara-negara Arab lah, terutama sekali Arab Saudi, banyak ART yang sering mengalami penyiksaan fisik.

Tidak sedikit jumlah ART yang sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kondisi ini sering sekali dialami sejak proses rekrutmen dan pemberangkatan ke negara tujuan. Di awal-awal rekrutmen oleh calo-calo agen di lapangan, misalnya, mereka sering kali menjadikan calon ART dalam ketidakpastian, khususnya terkait waktu keberangkatannya. Situasi semacam ini sering dijadikan kesempatan oleh para calo untuk meminta upah tambahan atau tips dari si calon ART tersebut dengan dalih mengusahakan agar nanti diterima bekerja di luar negeri. Hal ini pada dasarnya hanya siasat calo lapangan saja untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pada dasarnya mereka sudah mendapatkan jatah dari agennya.

Bahkan, lebih parahnya lagi karena kebanyakan, atau hampir mayoritas, calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang tujuannya ke luar negeri tersebut tidak punya ketrampilan tertentu. Sehingga, tidak sedikit dari mereka sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dari awal rekrutmen, misalnya, informasi yang didapatkan oleh para calon TKW tersebut adalah bekerja di wilayah domestik, namun pada kenyataannya di lapangan justeru tidak demikian. Ada sebagian mereka dipekerjakan di dunia malam dan sebagian lagi dengan sengaja dilacurkan.

Selain dari semua itu, dan tidak kalah penting adalah gaya hidup yang elitis dan pragmatis ala bangsa-bangsa Barat modern. Budaya dan gaya hidup mereka yang konsumtif dan hedonis sudah menjadi *way of life* sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kota. Keinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu bekerja atau usaha keras. Mereka cenderung menempuh jalur pragmatis dan cepat untuk mendapatkan kemewahan tersebut. Kenyataan ini, bagi pelaku *trafficking* dijadikan kesempatan dan peluang untuk menjaring korban. Gaya hidup populer yang dibawa oleh gelombang globalisasi saat ini sudah menjadi mimpi masyarakat kita. Nampaknya, gelombang gaya hidup modern-hedonis sudah tidak lagi dapat terbendung, terutama pada masyarakat kota Indonesia.

### 3. *Human Trafficking* Sebagai Buah Hedonisme

Fenomena *human trafficking* ini merupakan isu kemanusiaan kontemporer saat ini yang paling serius. Nampaknya, fenomena ini akan terus berlangsung entah sampai kapan. Peraturan terkait dengan *trafficking* dibuat baik di tingkat lokal, nasional, dan maupun global tidak secara total menghilangkan fenomena tersebut. Begitu juga, Hal tersebut dikarenakan didukung oleh adanya dua hal yang terus berlangsung: permintaan dan kemauan/keinginan. Permintaan di sini datang dari pengguna (*user*). Sementara, kemauan atau keinginan muncul dari golongan pencari kerja itu sendiri. Situasi ini—permintaan dan ketersediaan—ini terus muncul karena ditopang adanya budaya hedonisme di tengah masyarakat modern saat ini. Hedonisme yang merupakan anak kandung dari materialisme terus disokong oleh gelombang globalisasi.

Globalisasi, seperti yang kita tahu, saat ini sedang dan terus merambah tiga wilayah kehidupan umat manusia. *Pertama*, globalisasi dalam bidang ekonomi terjadi secara dahsyat dan hampir menyeluruh di pertengahan abad silam seiring dengan perkembangan sistem komunikasi dan transportasi, tumbuhnya perdagangan internasional, dan distribusi/investasi modal ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi yang diwakili oleh komputer dan pesawat terbang memperkuat keberadaan sistem ekonomi global itu. Nampaknya, kapitalisme tidak saja mempunyai peran penting dalam mewujudkan ekonomi global karena institusi-institusi kapitalisme seperti pasar modal, komoditas, dan buruh kontrak secara langsung memfasilitasi pertukaran ekonomi dunia. Selain faktor-faktor tadi, kerja sama multinasional juga merupakan elemen penting lain terbentuknya ekonomi global (Nasution, 2001:1-3).

Kerja sama itu didorong fase-fase berikut: sistem ekonomi nasional yang berbasis pada *cooperation* yang orientasinya pada produksi rakyat (*mass production*), kerja sama nasional yang berbasis pada pasar global, dan kerja sama multinasional yang didasari oleh spirit efisiensi produksi (*dispersal of production*), manajemen, dan

finansial. Sebagian kalangan mempercayai, kerja sama multinasional sekarang ini juga memasuki fase baru yang ditandai adanya perbedaan secara tajam pembagian tugas (*hyper differentiation*) dan besarnya sifat fleksibilitas.

*Kedua*, kerja sama internasional adalah aktor kunci ekonomi global yang secara langsung membentuk masyarakat global. Kajian tentang hal ini akan difokuskan pada perubahan penting peran negara-bangsa (*nation state*): menurunnya kekuatan (*power*) negara-bangsa dan tumbuhnya organisasi-organisasi internasional yang konsen terhadap isu-isu perdagangan, politik, ekologi, dan hak asasi manusia. Konsep negara-bangsa merupakan aspek penting dalam modernisasi yang mencakup empat pemikiran penting: kedaulatan teritorial, kontrol terhadap aset dengan kekerasan, struktur yang impersonal, dan legitimasi (Held, 1995:48-49).

Aspek penting lain perdebatan teori globalisasi adalah peran negara-bangsa yang akan terus mewarnai tatanan global. Kekuatan negara-bangsa akan melemah dengan sendirinya dan akan ada bentuk baru sebuah transisi komunitas politik. Sebaliknya, peran negara-bangsa terus berlangsung dalam memperkokoh masyarakat global. Pada satu sisi, meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional dan adanya bentuk desentralisasi kehidupan politik, di sisi lain. Sehingga, negara, pada dasarnya adalah pusat atau basis kekuasaan yang bisa mengimbangi pengaruh pasar global (Waters, 1995:66).

Wilayah terakhir, *ketiga*, yang terus dirambah oleh globalisasi adalah bidang budaya. Sudah dapat dipastikan analisa budaya hegemonik ini akan diletakkan dalam konteks globalisasi dan mengambil empat aspek yang saling berkaitan sebagai alat ukurnya. Pertama, munculnya budaya konsumerisme global berakar kuat pada gaya hidup dan preferensi pribadi. Fenomena ini sebagai bentuk *McWorld*. Terminologi ini lebih dari sekedar kemampuan untuk membeli makanan siap saji (*fast food*) yang berstandar global. Tapi, hal ini juga merepresentasikan munculnya sebuah kesamaan budaya konsumerisme yang diejawantahkan melalui gaya hidup dan preferensi pribadi. Kedua, menyebarnya rasionalisasi bersamaan dengan munculnya 'sistem paksa' (*coercive system*) administrasi negara-negara modern dan organisasi-organisasi ekonomi internasional. Senada dengan Barber, Max Weber (1946) melihat bahwa rasionalitas adalah suatu instrumen pemikiran yang melandasi sistem industri modern dan administrasi birokrasi (Berber, 1995:103).

### **Faktor-Faktor Pendorong**

Pengertian dan batasan yang dimaksudkan dengan *faktor* di sini merupakan hal-hal yang dapat mendorong dan menyebabkan seseorang terjebak masuk ke dalam suatu keadaan. Keadaan di sini tentu saja tidak menguntungkan bagi seseorang tersebut, yakni korban *trafficking*. Perdagangan manusia, pada praktiknya, baik langsung

maupun tidak, menyebabkan seseorang masuk ke dalam perangkap pelaku praktek *trafficking*. Dikorbankan di sini, dalam pengertian dirugikan dan dalam bentuk yang sangat variatif (Sudjana, 2009:183).

### 1. Ekonomi dan Kemiskinan

Dari kebanyakan korban *trafficking* di Kabupaten Indramayu, mereka menerima informasi awal tidak sesuai dengan yang mereka terima dan dapatkan di lapangan (Purwanto dan Sumpeno, 2003:6). Hal senada diungkap pula oleh Umrotun, pedagang nasi, di mana banyak tetangganya jadi *migrant labor* bahwa...

“...agen-agen yang sering menemui saya itu adalah agen lapangan yang nomor ke sekian kalinya dari mata rantai peragenan. Sering kali mereka tidak tau apa-apa kerjaan apa yang membutuhkan tenaga kerja. Bagi mereka [agen lapangan], yang terpenting adalah mendapatkan calon tenaga kerja. Jelas, mereka akan menerima komisi dari agen nomor pertama itu.<sup>4</sup>”

Dalam banyak kasus *human trafficking* di Kabupaten Indramayu, sejauh yang peneliti amati, bisa disimpulkan bahwa korban-korban *trafficking* tersebut tidak saja memiliki *single reason* (alasan tunggal), akan tetapi punya alasan beragam. Dari sekian banyak alasan, peneliti dapat simpulkan hanya ke dalam beberapa alasan saja. Perlu dikemukakan di sini juga bahwa kesimpulan tersebut dasarnya adalah aspek *majority* (kebanyakan) yang diungkap oleh para responden korban *trafficking*. Alasan-alasan tersebut antara lain; tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang tinggi, tidak memiliki keterampilan, kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan, dan terakhir adalah terlalu percaya kepada agen.

Adagium yang sangat mashur di sekitar peneliti yang punya perhatian terhadap isu perdagangan manusia bahwa *traffickers are motivated by money* (pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh materi/uang). Ini artinya, pelaku *human trafficking* didorong oleh adanya motif ekonomi. Faktor ekonomi tersebut merupakan fator pemicu atau stimulan utama terjadinya *human trafficking* (perdagangan manusia). Faktor kemiskinan ini jelas-jelas merupakan faktor *inheren* dari persoalan ketimpangan jumlah lapangan kerja yang tidak berimbang dengan besarnya jumlah penduduk (Haris, 2002:166-168).

Haji Fachrudin yang merupakan salah satu sesepuh Desa Atmajaya<sup>5</sup> di wilayah otoritas Kabupaten Indramayu mempunyai analisa yang cukup baik dalam melihat fenomena ini. Fachrudin mengatakan:

---

<sup>4</sup>Wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 19 Oktober 2019 di rumahnya.

<sup>5</sup>Bukan nama desa yang sebenarnya.

“...dulu, ketika saya muda, hamparan luas ladang [persawahan] ibaratnya ujung pinggirannya tidak nampak. Luas sekali. Bahkan, dalam satu tahun, bisa sampai tiga kali panen. Air masih cukup yang ditopang sistem irigasi yang cukup baik. Saking luasnya, empunya sawah, biasanya, setiap musimnya berebut kuli pengolah sawah. Sehingga, agar tidak kesulitan cari buruh setiap musim, para tuan tanah memanjakan para buruh dengan cara dimanjakan dengan fasilitas lebih.<sup>6</sup>”

Dari pernyataan Fachrudin tersebut, kita bisa menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama, bahwa jumlah lapangan kerja (luas area pesawahan) lebih banyak dari jumlah penduduk angkatan kerja. Ini artinya, bisa jadi, jika jumlah keseluruhan luas area persawahan dibagi jumlah angka penduduk hasilnya setiap kepala masih kebagian beberapa meter persegi sebagai lahan kerjaan atau garapannya. Pendeknya, jumlah lapangan kerja, dalam hal ini ini luas area pertanian atau pesawahan masih lebih besar jumlahnya dibanding dengan jumlah angka angkatan kerja yang ada waktu itu. Semenata itu, poin lainnya adalah bahwa kehidupan sosial ketika itu, bisa dikatakan, masih *simple*. Sehingga, kebutuhan dan ekspektasi kehidupan waktu itu juga masih terhitung sangat sederhana sekali.

Sebaliknya, situasi semacam itu tidak ditemukan lagi di jaman sekarang. Justeru sekarang ini situasinya berbeda sekali: Area pesawahan semakin berkurang, dan sementara jumlah penduduk, khususnya angkatan kerja angkanya semakin naik tak terkenal. Sehingga, lahan pertanian yang semakin terbatas tersebut menjadi rebutan para penduduk angkatan kerja, khususnya. Dari kenyataan inilah, bisa sekali untuk dikatakan, yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Selain kemiskinan, faktor lain adalah kesenjangan kesejahteraan di tingkat antarnegara juga menjadi faktor lain terjadinya perdagangan manusia. Biasanya, dalam konteks *human trafficking* (perdagangan manusia), negara-negara kaya dan lebih sejahtera tercatat atau lebih cenderung berposisi sebagai penerima korban-korban *trafficking*. Posisi ini, secara kontekstual, dapat dipahami. Bagaimana pun juga, bagi para korban *trafficking*, negara-negara kaya yang secara kesejahteraan warganya lebih baik dari negara asal korban *trafficking* dianggap akan dapat mengubah nasib dan masa depan mereka secara ekonomi. Sebaliknya, bagi korban

---

<sup>6</sup>Wawancara di lakukan di masjid di desanya ketika selesai menjalankan solat magrib berjamaah pada tanggal 21 Oktober 2019, pkl.19.00, bertempat di serambi masjid.

*trafficking*, anggapanya terhadap negara asalnya sangat pesimis untuk bisa mengangkat masa depan ekonomi dan kesejahteraannya. Jadi, bagi mereka lagi, resiko apapun yang akan diterima ketika proses migrasi tersebut menjadi kian tidak memengaruhi niatan mereka itu (Sudjana, 2009:121-132).

Sebaliknya, negara-negara yang secara kesejahteraan warganya lebih rendah cenderung berposisi sebagai pemasok korban *trafficking*. Dalam konteks negara-negara Asia Tenggara misalnya, Indonesia, dibanding negara-negara tetangga, Malaysia, Singapore, dan Brunai Darussalam, lebih rendah kesejahteraan warganya dibanding negara-negara tersebut. Sehingga, dalam konteks *trafficking*, Indonesia cenderung berposisi sebagai pemasok calon-calon korban *trafficking*. Terkait dengan persoalan ini, ibu Sarini, mantan TKI sekaligus agen lapangan perusahaan pengirim calon pekerja urban ke luar negeri, mengatakan:

“... dulu di awal-awal dimana saya jadi TKI di Brunai Darussalam di era awal tahun 1980an, bisa dikatakan, masih sepi sepi peminat. Namun, setelah saya berhasil, yah, yang kelihatan ya saya bangun rumah dan beli sawah. Sehingga, secara ekonomi saya lebih baik dibanding sebelum saya berangkat kerja di luar [negeri]. Setelah lihat keberhasilan saya tersebut, banyak tetangga saya mengikuti jejak saya tersebut. Beberapa dari mereka, alhamdulillah, berhasil juga. Yah, paling tidak, dilihat dari gaji yang tiap bulan saya terima, di sana [negara tujuan], lebih banyak dibanding dari pada kerja di sini.”<sup>7</sup>

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari deskripsi di atas adalah bahwa kondisi tertentu masyarakat, kemiskinan misalnya, dapat memicu, mendorong, dan atau menguatkan terjadinya *trafficking*. Sementara itu juga, Indonesia saat ini mengalami semacam ledakan jumlah angkatan kerja produktif sangat banyak sekali. Sehingga, dari jumlah tersebut munculnya semacam dinamika sosial yang mempunyai orientasi penguatan ekonomi domestik. Sehingga, keinginan ke arah itu masih merupakan faktor sosial yang merupakan pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan secara menyeluruh, terutama keluarga miskin di kota. Usaha pemerintah tersebut, salah satunya, adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

## 2. Budaya Patriarki: Menolak Kesetaraan Gender

Ada beberapa faktor yang memengaruhi bangunan pemikiran pemilahan yang berorientasi pada gender. Diantara faktor-faktor tersebut secara berurutan disebutkan sesuai dengan kualitas pengaruhnya. Faktor-faktor tersebut adalah; pemahaman agama, budaya, media, undang-undang/aturan negara, proses

---

<sup>7</sup>Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019, pkl 13-23, di rumahnya.

pendidikan, dan sistem ekonomi. Agama apapun, ambil contohnya adalah Islam, misalnya, lahir dan berkembang di dataran Arab. Sehingga, tafsir maupun bentuk-bentuk ajarannya tidak jauh dari budaya dan cara pikir masyarakat Arab. Ajaran seputar pembagian waris dalam Islam, misalnya, hal itu merupakan ajaran yang, katakan, terinspirasi oleh budaya Arab yang sudah melewati proses-proses tertentu. Sehingga, formulasinya sudah berbeda dengan formulasi awalnya.

Sedikitnya, ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam mengukur keadilan gender. Patokan pertama adalah aksesibilitas. Ini artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang sama. Sementara itu, patokan kedua adalah kontrol. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak kontrol yang sama atas tubuh dan penghasilan. Patokan berikutnya adalah mempunyai hak partisipasi yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam hal, misalnya, mengambil keputusan-keputusan strategis baik di tingkat domestik maupun di tingkat yang lebih besar. Patokan terakhir adalah hak manfaat yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan dapat ikut menikmati manfaat dari hasil kerja kerasnya maupun dalam menikmati pembangunan nasional.

Ada beberapa indikator untuk mengukur ketidakadilan gender di suatu masyarakat. Indikator pertama adalah adanya usaha dan tindakan—baik disadari ataupun tidak—*diskriminasi* dalam perlakuan yang didasari oleh adanya orientasi gender. Seperti perbedaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, misalnya, dimana laki-laki diberikan kesempatan yang luas dan lebih dibanding perempuan. Disamping usaha diskriminasi tadi, indikator selanjutnya adalah adanya *subordinasi* (perendahan). Istilah untuk menunjuk perempuan dengan *konco wingking* merupakan sebutan yang pada dasarnya meletakkan perempuan sebagai pelengkap.

Selain diskriminasi dan subordinasi, indikator lain adalah *marginalisasi* (peminggiran). Keyakinan terhadap ajaran seputar proses penciptaan Siti Hawa, misalnya, yang bahannya diambil dari tulang rusuk Nabi Adam AS itu pada dasarnya untuk menunjuk bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Keyakinan semacam ini, oleh banyak kalangan umat Muslim, dipahami secara harfiah. Dari pemahaman yang seperti itu ada kesan bahwa perempuan diciptakan dari unsur laki-laki. Sehingga, dengan kata lain, perempuan diciptakan sebagai pelengkap dari keberadaan laki-laki. Keberadaan penciptaanya tidak independen, tapi terkait dengan laki-laki. Nampaknya, ada usaha subordinasi dengan proses penciptaan perempuan dengan cerita-cerita yang dianggap bagian dari ajaran Islam.

Indikator lain adalah *pelabelan negatif (stereotyping)*. In artinya, ada hal-hal yang, saya kira, ini merupakan konstruk budaya yang menyalahi faktor kodrati kaum perempuan. Ketika perempuan dalam kondisi menstruasi, misalnya, maka ruang lingkup gerakannya sangat terbatas. Bahkan, tidak saja ruang gerak yang dibatasi, namun posisinya harus di jauhi. Ketika dalam kondisi menstruasi, perempuan harus tidur sendirian, tidak boleh bareng suami. Dalam kondisi menstruasi pula, perempuan tidak boleh ke masjid, misalnya lagi. Banyak contoh yang tidak bisa dikemukakan di sini seputar *stereotyping* terhadap kaum perempuan.

Indikator terakhir adalah *kekerasan*. Kekerasan disini sangat luas pengertiannya. Disamping kekerasan fisik seperti pemukulan juga kekerasan fisikis. Saya kira, banyak bentuk kekerasan yang sering kali didapatkan kaum perempuan. Disamping kedua bentuk kekerasan di atas, juga ada kekerasan yang sifatnya tidak langsung, seperti kekerasan yang terstruktur. Segal kebijakan kenegaraan, misalnya, terkait seputar kaum perempuan, dalam budaya patriarkis, selalu mengorbankan kaum perempuan. Dalam kebijakan ekonomi, misalnya, pembatasan jam kerja bagi perempuan itu pada dasarnya tidak menguntungkan bagi kaum perempuan itu sendiri. Laki-laki boleh bekerja sampai larut malam, sementara perempuan tidak boleh.

### 3. Rendah Pendidikan dan Ketrampilan

Permasalahan *human trafficking* memang sangat kompleks. Artinya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyokong terjadinya *trafficking* tersebut sangat beragam. Kita tidak bisa hanya mempercayai hanya pada faktor tertentu saja. Disamping persoalan kedua di atas, faktor lain yang tidak kalah penting dalam melihat *human trafficking* adalah rendahnya aspek pendidikan dan ketrampilan para korban *trafficking*. Sudah barang tentu, kondisi—rendahnya pendidikan dan ketrampilan—korban *trafficking* tidak hadir begitu saja. Tapi, hal tersebut, bisa jadi, merupakan bagian atau imbas dari kebijakan tertentu yang dibuat oleh rezim pemerintah tertentu pula (Tagora dan Sofia, 1999:11).

Apa yang dikatakan Suparman berikut dapat menggambarkan *word view* masyarakat Indonesia terhadap pendidikan di era 1980an. Suparman menuturkan:

“... saya lahir, kata orang tua saya, persis setelah Belanda hengkang dari bumi Indonesia. Dan saya juga dibesarkan dalam keluarga miskin dengan lima bersaudara. Saya anak nomor tiga dari lima bersaudara. Kedua orang tua saya buruh tani dan sebagai *pawongan*<sup>8</sup> pada juragan Basirun. Waktu itu, saya masih ingat, bayaran yang diterima orang tua saya dalam seminggu

---

<sup>8</sup>*Pawongan* adalah istilah lokal yang menunjuk pada seseorang yang bekerja untuk majikan tertentu secara permanen. Dengan kata lain, *pawongan* merupakan *pekerja tetap* tuan tertentu.

adalah berupa padi. Dalam seminggu, bapak saya bawa tiga *gedengan*<sup>9</sup> padi dari majikan. Tiga *gedengan* tidak cukup dimakan bertujuh dalam seminggu. Sehingga, ibu saya masih berusaha untuk menutupi kekekuran tersebut dengan cara jualan sarapan di pagi hari. Boro-boro kami mikir untuk belajar ke sekolah. Yang kami pikir waktu itu hanya besok bisa makan tidak. Itu yang terjadi saat itu.<sup>10</sup>

Untuk menghidupi keluarganya, masyarakat Indonesia, waktu itu, salah satu dari macam pekerjaan adalah menjadikan dirinya sebagai *pawongan* pada majikan dan keluarga kaya tertentu. Pada jaman itu, keluarga kaya adalah keluarga yang mempunyai banyak tanah dan ladang yang luas. Sehingga, untuk mengelola dan mengurus tanah puluhan tau bahkan ratusan hektar membutuhkan banyak pekerja. Dari realitas ini konsep *pawongan* menjadi sebuah model dalam dunia pekerjaan ketika itu. Sehingga, satu majikan dan keluarga kayak rata-rata mempunya 10 sampai 20 *pawongan*. Bedanya dengan pekerja biasa, pertama, *pawongan* lebih bersifat permanen. Artinya, seorang *pawongan* akan berhenti bekerja untuk mejikannya ketika sudah meninggal dunia. Ini terlepas dari kecocokan antara majikan dengan *pawongannya*. Biasanya lagi, kedua, *pawongan* lebih bersifat regenerasi. Maksudnya, ketika seorang *pawongan* meningal dunia, akan besar kemungkinan akan digantikan oleh anak laki-lakinya.

Pada dasarnya, sistem *pawongan* tidak hanya untuk dan didominasi kaum laki-laki, namun juga kaum perempuan juga sekalian dan bahkan seluruh anggota keluarganya. Ketergantungan keluarga *pawongan* terhadap majikannya itu sangat besar sekali. Sehingga, masa depan keluarga seorang *pawongan* juga didedikasikan untuk majikannya. Potret semacam ini memang sudah menjadi, katakanlah, *world view* bangsa Indonesia waktu itu, khususnya sebelum era kemerdekaan. Bagi masarakat Indonesia, menggantungkan hidup kepada, atau menobatkan dirinya sebagai *pawongan* pada majikan atau keluarga kaya tertentu adalah bagian dari upaya penguatan ekonomi keluarga. Tidak ada pekerjaan tertentu yang khusus dikerjakan oleh *pawongan*, namun apapun yang dibutuhkan majikan harus bisa mengerjakannya. Tidak hanya untuk bekerja di ladang, namun di rumah sekalipun.

*Pawongan* memang bekerja tidak berdasarkan profesionalitas dan dengan latar belakang pendidikan tertentu. Pendidikan formal yang mereka tempuh hanya cukup untuk bisa baca-tulis. Rata-rata pendidikan mereka sampai kelas tertentu Sekolah Rakyat (SR), setingkat Sekolah Dasar (SD). Itu jg tidak selesai. Dengan kondisi seperti ini, sehingga, harus dipahami pekerjaan mereka juga adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan profesionalitas tertentu. Hanya saja pengetahuan mereka

---

<sup>9</sup>Padi tempo yang diiket tangkainya yang fungsinya sebagai ukuran atau takaran.

<sup>10</sup>Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2019, pkl. 21.12 di rumahnya.

seputar teknik pengelolaan ladang atau bidang lainnya, misalnya, diperoleh dari pengalaman langsung mereka di lapangan. Ketika masih anak-anak, orang tua mereka sering kali meminta membantu bekerja di ladang atau sawah.

Menarik disimak apa yang dikemukakan oleh Tarmidzi, generasi kedua yang menggantikan bapaknya sebagai *pawongan* pada majikan. Tarmidzi menuturkan:

“...ketika saya masih kecil, cita-cita saya, waktu itu, ingin sekali menjadi *kuwu*.<sup>11</sup> Tapi harapan atau cita-cita itu pupus ketika bapak saya meminta saya untuk berhenti sekolah. Alasan bapak memang bisa saya pahami. Di samping persoalan budaya, juga masalah, katakan, fungsi. Budaya di sini, masyarakat menganggap sekolah adalah budaya Belanda, penjajah yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Sementara, fungsi pendidikan tidak bisa menjawab persoalan hari ini [kebutuhan pangan] secara instan.<sup>12</sup>”

Dari apa yang disampaikan Tarmidzi tersebut, pada dasarnya merefleksikan beberapa hal penting berikut; pertama, kebutuhan masyarakat Indonesia ketika itu, jaman pra-kemerdekaan, sangat *simple* sekali. Kebutuhan mereka terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan *instant* tersebut merupakan tujuan utama masyarakat Indonesia dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini didorong oleh kenyataan kehidupan bangsa Indonesia ketika itu. Faktanya memang, kondisi Indonesia, khususnya kehidupan ekonomi, memang sangat susah sekali. Untuk mendapatkan bahan pokok, seperti beras misalnya, sangat susah sekali. Orang bekerja tidak untuk mendapatkan uang, tapi bahan-bahan pokok.

Kesulitan ekonomi mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan *survival* dengan berbagai model dan caranya. Salah satu yang banyak ditempuh bangsa Indonesia untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut adalah dengan urbanisasi. Menurut keterangan berbagai sumber, pada era itu terjadi urbanisasi secara besar-besaran. Bahkan, urbanisasi tersebut tidak saja dilakukan di tingkat internal dalam negeri, tapi juga luar negeri sekalipun. Dari sinilah persoalan atau sejarah *human trafficking* harus dilihat. Hal ini merupakan persoalan pertama yang mesti ditimbang sebelum melihat persoalan-persoalan lainnya. Yang mendorong terjadinya *human trafficking* memang sangat kompleks, disamping ekonomi, juga masalah profesionalitas korban yang tentu hal ini berkaitan dengan pendidikan.

Salah satu jalan keluar alternatif untuk membendung naiknya kasus-kasus *trafficking* adalah dengan cara penguatan sektor pendidikan. Sektor ini merupakan dasar dari bidang-bidang lain sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Karena faktor pendidikan dan ketrampilan rendah, maka lapangan kerja yang tersedia

---

<sup>11</sup>Istilah lokal, hanya di wilayah III Cirebon, untuk menyebut kepala desa/kelurahan.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Tarmidzi 14 Oktober 2019, pkl. 21.12 di rumahnya.

untuk level yang rendah tingkat pendidikannya adalah pekerjaan kasar. Tidak saja itu, level pendidikan rendah juga akan memengaruhi kualitas seseorang dalam banyak hal. Tidak saja dalam hal psikologis, tapi juga psikis. Psikologis di sini tentu terkait dengan kematangan pikir seseorang dalam mensikapi persoalan.

Di Kabupaten Indramayu, kebanyakan korban *trafficking* atau bahkan mereka mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saya temui, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri kebanyakan berpendidikan rendah. Walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan sarat dasar pendidikan bagi mereka yang hendak menjadi TKI, namun banyak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) memanipulasi data calon TKI. Pemalsuan semacam ini tidak hanya di tingkat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), namun juga di level dokumen atau akta lahir. Disamping keduanya, pemalsuan jg ditingkat status sosial.

Ada beberapa mantan TKI juga yang umurnya belum memenuhi syarat, namun status sosialnya janda. Di Kabupaten Indramayu kasus semacam ini banyak sekali ditemukan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan memenag belum sepenuhnya baik. Setelah lulus Sekolah Dasar (SD), di era tahun 80an, jarang sekali yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tidak menutup dari sebagian masyarakat memang yang melanjutkan ke level Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun bisa dikatakan kecil sekali angkanya. Kebanyakan, tamat SD, dua atau tiga tahun berikutnya menikah.

#### 4. Pernikahan Dini

Realitas sosial semacam ini di Kabupaten Indramayu sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Mayoritas masyarakatnya yang petani itu, sehingga, ada semacam stereotip yang ditempelkan ke mereka adalah *panen kawin, tander pegatan* (musim panen nikah, musim tanam cerai). Itu artinya, ketika musim panen secara otomatis banyak uang. aKetika musim panen, akan banyak uang. Sehingga, biaya untuk nikah dan resepsi pernikahan menjadi gampang. Tapi sebaliknya, musim tanam justeru banyak mengeluarkan uang untuk modal tanam, beli pupuk, ongkos kuli, dan sebagainya. Sehingga, akan menjadi kesulitan tersendiri ketika hendak melangsungkan pernikahan.

Memang, di sebagian wilayah di Kabupaten Indramayu ada sistem *buwuhan*.<sup>13</sup> Dengan sistem *buwuhan* itu, sehingga, ketika seseorang ingin mengadakan hajatan untuk momen tertentu tidak menjadi kesulitan yang serius. Sistem *buwuhan* adalah model kerja sama atau gotong royong antar sesama warga masyarakat tertentu khusus untuk masalah hajatan. Misalnya, bapak A ingin mengadakan resepsi

---

<sup>13</sup>*Buwuhan* dari kata dasar *buwuh* yang secara harfiah berarti *berpartisipasi* untuk seseorang yang memerlukan modal.

sunatan, bapak A tersebut cukup memberitahukan ke tetangga dan masyarakatnya sekitarnya siapa yang mau *buwuh* untuk acara tersebut. beberapa hari setelah pemberitahuan itu, pasti deri sebagian maupun masyarakat sekitar ada yang datang ke rumah menawarkan apa yang diinginkan sebagai *buwuh*-nya? Selanjutya bapak A akan menentukan atau bikin semacam *list* apa saja yang diperlukan untuk keperluan berlangsungnya acara resepsi sunatan tersebut.

Bisa jadi, sistem *buwuhan* tersebut telah mendorong masyarakat di Kabupaten Indramayu menggampangkan persoalan pesta-pesta atau momen-momen tertentu. Bisa jadi juga sistem *buwuhan* tersebut, secara langsung maupun tidak, telah melakukan pembenaran atas *panen kawin, tandur pegatan* tersebut. Jargon tersebut mengalami justifikasi dari kondisi psikologis sosial masyarakat Indramayu. Artinya, gambaran seputar masyarakat Indramayu yang dirangkum dalam seloroh *panen kawin, tandur pegatan* (musim panen nikah, musim kering cerai) benar adanya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan eksplanasi di atas, ada beberapa penyebab terjadinya praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten indramayu, Jawa Bart. Sedikitnya saya mencatat poin-poin berikut, *pertama*, bahwa *human trafficking* merupakan persoalan yang cukup luas sekali. Sehingga, dalam beberapa tindakan tidak bisa dilakukan semacam generalisasi atau kategorisasi sebagai *trafficking*. Dalam konteks pengertian dan batasan, perdagangan manusia sedikitnya mencakup beberapa kegiatan berikut; *perekrutan*. Kata tersebut berarti perekrutan dengan disertai iming-iming atau janji-janji untuk bermigrasi atau berpindah dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuan. Makna lain *trafficking* adalah perpindahan seseorang dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuan karena pengaruh orang lain walaupun tanpa perjanjian sebelumnya.

*Kedua*, termasuk dalam kategori kegiatan perdagangan manusia ketika ada kegiatan transfer atau pengiriman ke daerah/negara lain bersifat tertutup dan dimana ada perasaan asing di dalamnya. Dikatakan sebagai korban perdagangan manusia juga ketika si korban mengalami semacam isolasi diri baik secara fisik maupun psikis dimana bahasa dan budaya daerah/negara tujuan berbeda dengan asal daerah/negara. Disamping itu, kondisi lain yang menguatkan sebagai korban perdagangan manusia ketika ada aktifitas yang bersifat eksploitatif setelah proses transfer tersebut. Ini artinya, transfer dan masuknya dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain tersebut tidak dilihat dari aspek legalitasnya, namun pada sisi aktifitas yang didapatkan setelah proses transfer tersebut.

*Ketiga*, adanya aktifitas *perpindahan, penampungan, maupun penerimaan* dimana ketiga proses tersebut merupakan satu paket. Artinya, hampir mustahil kegiatan

atau aktifitas *human trafficking* hanya melalui salah satu dari ketiga proses tersebut. Proses pertama, korban mengalami perpindahan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lain sebagai tujuannya. Sudah barang tentu, perpindahan di sini baik didasari atas kesadaran korban sendiri ataupun tidak. Tidak sedikit kasus, misalnya, beberapa korban *trafficking* yang mengalami semacam aktifitas yang tak *terjadualkan*. Artinya, seringkali waktu pemberangkatan, misalnya lagi, tidak jarang mendadak tidak terkonfirmasi dengan korban jauh-jauh hari. Sehingga, si korban tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Tidak tau persis apakah kondisi ini memang disengaja atau tidak. Bisa jadi, kondisi ini menunjukkan tidak adanya komunikasi yang intens antaragen.

Proses selanjutnya, *keempat*, adalah adanya tidakan eksploitatif terhadap korban. Eksploitatif di sini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berorientasi mengambil keuntungan, tujuan, dan kepentingan pribadi dari orang lain. Tindakan eksploitasi terjadi ketika seseorang mendominasi orang lain dalam konteks tertentu. Eksploitasi di sini tentu bentuknya tentu tidak tunggal. Sarbini, buruh migran Indonesia di Saudi Arabia mengalami eksploitasi fisik yang luar biasa dalam bentuk kerja paksa.

#### REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Barber, Benjamin. (1995). *Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World*. New York:Ballantine Books.
- Haris, Abdul. (2002). *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta Di Balik Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta:pustaka Pelajar.
- Held, David, (1995). *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Standford Calif:Standford University Press.
- Muhadjir, Noeng. (1991). Wahyu Dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme – Metodologik; Metode Kualitatif. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tria Wacana.
- Nasution, M. Arif, (2001). *Orang Indonesia di Malaysia: Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*. Yogyakarta:pustaka Pelajar.
- Purwanto, Eddy dan Suryo Sumpeno. (2003). *Menangani Sendiri Kasus-kasus Buruh Migran Indonesia*. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI):Jakarta.
- Sudjana, Eggi, (2009). *Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*. Jakarta:RMBOOKS.

Tagaroga, Rusdi dan Encop Sofia. (1999). *Perdagangan Buruh Migran Indonesia*. Nusa Tenggara Barat (NTB):Koslata.

Walters, Leroy, (1985). Religion and the Renaissance of Medical Ethics. *Theology And Bioethics: Exploring the Foundations and Frontiers*, The Netherlands: D. Reidel.